
ANALISIS DAYA SAING USAHATANI KELAPA SAWIT RAKYAT DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

JAWARI¹⁾, ANI MUANI²⁾, RADIAN²⁾

¹⁾ Alumni Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Tanjungpura Pontianak.

²⁾ Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

This study was aimed to analyze the competitiveness of farming palm oil (competitive and comparative advantage), Random Sampling method was used to select 88 respondents was determined purposive. The reason for choosing of Subah District because this area is largest palm oil producers and largest and oil palm planting area in the Sambas Regency . The data used primary and secondary data. The Policy Analysis Matrix (PAM) method was used to analysis data. farming palm oil in Subah District has competitive and comparative excellence. Private propitability(PP) and Social propitability (SP)is positive value of, Private Cost Rasio (PCR) 0,24, Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) is 0,15. Transfer Output (TO) is value negatif Rp – 6.909.408,00/ha/year , it's shows nothing transfer from consument to produsent, value 0,80 Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) or NPCO < 1, output price not significant for farmers income. (Nett Transfer) NT negative value (-8.088.401), it's nothing surplus value that be accepted farmers from input price and output price. Value 0,70 Profit Coefficient(PC) or PC < 1 meaning farmer isn't receive insentive from netto and Subsidies Ratio Producers) SRP 0,25 or SRP < 1 meaning price of input-output like the fertilizer subsidies and increase profit output price is very needed for farming palm oil.

Key words: Competitiveness, competitive and comparative excellence.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sambas memiliki potensi sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan usahatani kelapa sawit. Pengembangan areal penanaman kelapa sawit dan produksi kelapa sawit di daerah ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pembukaan areal penanaman baru dan telah berproduksinya tanaman muda. Kelapa sawit merupakan komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan Kalimantan Barat, data tahun 2013 menunjukkan bahwa luas kebun kelapa sawit mencapai 1,06 juta ha (BPS Kalbar, 2014). Di Kabupaten Sambas tahun 2013 luas areal perkebunan sawit mencapai 73.797,09 Ha, sedangkan di Kecamatan Subah luas areal perkebunan sawit sebesar 25.274,80 Ha dengan luas perkebunan sawit rakyat sebesar 2.274,80 Ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas, 2014).

Kecamatan Subah Kabupaten Sambas telah menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi unggulan terlihat dari sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari usaha tani kelapa sawit. Rata - rata penguasaan lahan usahatani kelapa sawit di daerah ini adalah 2 ha, dengan tingkat produktivitas sebesar 1.800 kg/ha/ bulan maka hasil pertahunnya 21.600 Kg/ha/tahun.

Konsep daya saing adalah sesuatu yang sangat dinamis, dimana keunggulan saat ini bisa saja menjadi ketidakunggulan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang belum unggul saat ini sangat mungkin untuk semakin tidak unggul lagi di masa yang akan datang (Pahan, 2008). Tingginya tingkat persaingan antar negara tidak hanya akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga akan berdampak langsung pada perekonomian daerah khususnya. Kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap daerahnya. (Simanjuntak, 1992). Untuk perkebunan sawit rakyat pada umumnya dan khususnya petani sawit rakyat di Kecamatan Subah sangat mengharapkan adanya subsidi berupa sarana produksi, bantuan pinjaman baik dari pihak perbankan maupun dari sumber keuangan Mikro dan harga yang layak diterima petani.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas baik keunggulan komparatif dan kompetitif.

METODE PENELITIAN

Metode penetapan sampel

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Observasi, Survey dan Kepustakaan. Teknik pengambilan Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*). Menurut Sugiyono (2009) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Subah dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Subah merupakan wilayah yang terluas dalam pengusahaan usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sambas. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara yang disertai dengan daftar kuisisioner terstruktur.

Untuk pengambilan sampel petani dalam penelitian ini dilakukan secara *stratified random sampling* dengan mengambil sampel petani kelapa sawit rakyat yang tanamannya sudah menghasilkan (TM). Petani responden yang diambil adalah petani sawit rakyat yang berjumlah 88 orang.

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui daya saing kelapa sawit digunakan metode PAM (Policy Analysis Matrix) yang telah dikembangkan oleh Monke dan Pearson sejak tahun 1989. Metode PAM merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau dampak intervensi dalam pengusahaan berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis. Analisis ini dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai wilayah, tipe usahatani dan teknologi. Selain itu analisis PAM juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu divergensi dapat memperbaiki daya saing terhadap pengusahaan suatu komoditas yang dihasilkan melalui penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan. Matrik PAM dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)

Uraian	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Tradable Input	Input Non Tradable	
Harga Pasar	A	B	C	$D = A - B - C$
Harga Sosial	E	F	G	$H = E - F - G$
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K$

Sumber : Monke dan Person (1989)

Keterangan :

- A = Penerimaan usahatani kelapa sawit pada harga privat
- B = Total biaya tradable usahatani kelapa sawit pada harga privat
- C = Total biaya non tradable usahatani kelapa sawit pada harga privat
- D = Tingkat keuntungan pada harga privat
- E = Penerimaan usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- F = Total biaya tradable usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- G = Total biaya non tradable usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- H = Keuntungan sosial;
- I = Output transfer
- J = Input Transfer;
- K = Faktor Transfer;
- L = Net Transfer

1. Analisis Keuntungan

- a. *Private Profitability* (PP), yaitu $D = A - (B + C)$. Keuntungan privat merupakan indikator daya saing (*competitiveness*). Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh profit diatas normal. Hal ini mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi. Sebaliknya, bila Nilai $D = 0$, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh profit dibawah normal dan belum mampu ekspansi.
- b. *Sosial Profitability* (SP), yaitu $H = E - (F + G)$. Keuntungan sosial merupakan indikator keuntungan komparatif (*comparative advantage*) atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan yang efisien, apabila $H > 0$. Sebaliknya, bila $H = 0$, berarti sistem komoditas tidak mampu bersaing tanpa bantuan atau intervensi pemerintah.

2. Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi

- a. *Private Cost Ratio* (PCR) = $C / (A - B)$
 Apabila nilai PCR < 1 dan nilainya makin kecil, berarti sistem produksi usahatani kelapa sawit semakin kompetitif dan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan kemampuannya tersebut akan meningkat. Sebaliknya bila, PCR = 1, sistem komoditas yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.
- b. *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR) = $G / (E - F)$
 Jika DRCR < 1, maka sistem komoditas mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya jika DRCR = 1 sistem komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Harga Privat dan Harga Sosial

1.1. Harga Privat dan Sosial Pada *Input Tradable*

Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa para petani setempat saat ini hanya menggunakan satu jenis pupuk yaitu pupuk NPK ponska bersubsidi yang petani beli pada kios-kios saprodi di lokasi penelitian.

Sedangkan untuk herbisida para petani ditempat penelitian menggunakan herbisida sistemik yang juga petani beli di kios – kios saprodi yang ada di lokasi penelitian. Untuk harga privat dan sosial pada input tradable lihat tabel 2.

Tabel 2. Harga privat dan sosial pada *input tradable* usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah.

<i>I n p u t</i>	Satuan	Jml Fisik (rata-rata)	Harga Privat (Rp)	Harga Sosial (Rp)
NPK Ponska	Kg	280	2.900,-	2.755,-
Herbisida Sistemik	Liter	3,159	50.000,-	40.000,-

Sumber : Hasil Analisis, 2016

1.1.1. Input tradable NPK Ponska

Harga privat pupuk NPK ponska bersubsidi disesuaikan dengan harga aktual pupuk yang ada di lokasi penelitian yaitu Rp 2.900,-/kg namun untuk harga sosialnya, bahwa harga pupuk sejak Oktober 1994 telah diserahkan pada pasar bebas, sehingga harga sosialnya 95% dari harga privat (Zulaiha 1997 dalam Oemar dan Mulyana, 2006). Dengan demikian harga sosial pupuk NPK ponska adalah Rp 2.900 x 95% yaitu Rp 2.755/kg.

1.1.2. Input tradable herbisida sistemik

Untuk komponen herbisida sistemik, harga privatnya diambil dari harga yang berlaku di lokasi penelitian (harga di kios– kios saprodi setempat) yaitu Rp 50.000,-/ liter Sedangkan untuk harga sosial herbisida didekati dengan harga rata-rata aktual, kemudian di kurangi tarif impor 10% dan pajak pertambahan nilai 10% (Saptana, dkk, 2001) jadi untuk harga sosial herbisida yaitu Rp 50.000,- (20% x 50.000,-) = Rp 50.000,- Rp 10.000,- = Rp 40.000,-

1.2. Harga Privat dan Sosial Pada *Input Non Tradable*

1.2.1. Harga Privat dan sosial tenaga kerja

Harga Privat tenaga kerja dalam penelitian ini disesuaikan dengan harga upah yang berlaku ditempat penelitian yaitu dihitung hari orang kerja (HOK). Harga upah/HOK ditentukan dengan berapa jam lamanya bekerja. Kalau bekerja 8 jam upah /HOK Rp 85.000,- (mulai kerja jam 07.00 wiba sampai jam 11.00 wiba istirahat kemudian dilanjutkan jam 13.00 wiba selesai jam 17.00). Kalau bekerja 7 jam upah /HOK Rp 75.000,- (mulai kerja jam 07.00 wiba sampai jam 11.00 wiba istirahat dilanjutkan jam 13.00 wiba selesai jam 16.00) dan apabila bekerja hanya 6 jam upah/HOK Rp 65.000,- (mulai kerja jam 07.00 wiba sampai jam 10.00 wiba istirahat dilanjutkan jam 13.00 wiba selesai jam 16.00 wiba). Diketahui dari 88 orang responden yang membayar upah /HOK Rp 85.000,- berjumlah 6 orang, yang membayar upah /HOK 75.000,- berjumlah 8 orang dan yang membayar /HOK Rp 65.000,- berjumlah 74 orang, jadi rata-rata upah dari 88 orang responden yaitu $Rp\ 85.000 \times 6 = Rp\ 510.000 + Rp\ 75.000 \times 8 = Rp\ 600.000 + Rp\ 65.000 \times 74 = Rp\ 4.810.000 = Rp\ 5.920.000 / 88 = Rp$

67.272,73. Untuk harga Privat tenaga kerja dalam penelitian ini mengambil harga rata-rata yang berlaku ditempat penelitian yaitu Rp 67.272,73- /HOK

Harga sosial upah tenaga kerja dalam penelitian ini ditentukan dengan memakai perhitungan harga sosial Rusastra *et.al dalam* Novianti (2003) yaitu sebesar 80 persen dari tingkat upah yang berlaku di tempat penelitian. jadi harga upah sosial tenaga kerja yaitu Rp 67.272,73 X 80% = Rp 53.818,18.

1.2.2. Panen

Panen buah sawit dilaksanakan 2 kali/bulan, untuk memanen 1 Ha tanaman sawit dibutuhkan 1 HOK. jadi untuk panen selama setahun adalah 2 X 12 X 1 HOK = 24 HOK/tahun.

1.2.3 Pembersihan lahan (semprot)

Pembersihan lahan atau penyemprotan kebun kelapa sawit dilakukan 4 bulan sekali untuk menyemprot 1 Ha kebun sawit diperlukan 1 HOK jadi untuk penyemprotan dilakukan 3 kali setahun, dengan demikian tenaga kerja pembersihan lahan (semprot) 3 X 2 HOK = 6 HOK/tahun.

1.2.4 Proning pelepah

Proning pelepah dilaksanakan sebulan sekali atau setelah 2 kali buah sawit di panen. untuk proning pelepah sawit 1 Ha diperlukan 1 HOK jadi tenaga kerja untuk 1 tahun proning pelepah 12 X 1 HOK = 12 HOK.

1.2.5. Pemupukan

Pemupukan kelapa sawit dilaksanakan 4 bulan sekali. untuk memupuk 1 Ha diperlukan 1 HOK jadi tenaga kerja untuk memupuk 1 tahun adalah 3 X 1 HOK = 3 HOK

1.2.6. Pengangkutan buah

Buah sawit yang sudah selesai dipanen perlu diangkut ke tempat penimbangan hasil (TPH) di tepi jalan. untuk mengangkut buah kelapa sawit 1 Ha diperlukan 1 HOK. jadi tenaga kerja untuk 1 tahun = 2 X 12 X 1 HOK = 24 HOK

1.2.7. Pemungutan brondolan

Pekerjaan pemungutan brondolan dilakukan 2 kali setiap bulan, untuk memungut brondolan buah sawit 1 Ha memerlukan ½ HOK. Jadi tenaga kerja untuk memungut brondolan 1 tahun = 2 X 12 X ½ HOK = 12 HOK.

1.3. Harga privat dan sosial lahan hasil konversi

Harga privat dan sosial lahan pada penelitian ini adalah nilai beli lahan yang berlaku di daerah penelitian yaitu Rp 5.000.000,-/ Ha kemudian dibagi dengan masa produksi selama 25 tahun. Dengan demikian harga privat dan harga sosial hasil konversi lahan adalah Rp 5.000.000,/25 tahun = Rp 200.000,/ tahun Hal ini didasari pada pemikiran bahwa mekanisme pasar lahan di pedesaan berjalan dengan baik. Walaupun berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar petani merupakan pemilik lahan baik yang diperoleh dengan membeli tunai maupun pembagian pemerintah, . Sehingga untuk perhitungan harga sosial ditempuh dengan cara menyeragamkan ke dalam nilai beli lahan aktual

1.3.1. Harga privat dan sosial bibit Kelapa Sawit

Harga privat dan sosial bibit kelapa sawit merupakan harga beli actual yang berlaku di lokasi penelitian yaitu Rp 25.000,-/ batang kemudian dibagi dengan lamanya masa produksi selama 25 tahun. Jadi harga Privat dan harga sosial bibit kelapa sawit setelah dikonversi adalah Rp 25.000 / 25 tahun = Rp 1.000,/batang/ tahun. Harga bibit kelapa sawit tersebut didapat dari penjual bibit kelapa sawit

yang ada di tempat penelitian. penentuan harga privat dan sosial bibit Kelapa Sawit juga diasumsikan bahwa *border price* bibit Kelapa Sawit tidak ada.

1.3.2. Harga privat dan sosial alat-alat setelah di konversi

Harga privat dan sosial alat-alat sama karena alat-alat tersebut diperdagangkan di pasar domestik.

- Harga dodos di tempat penelitian Rp 100.000,/ unit, masa pakai 1 unit dodos untuk lahan 1 Ha selama 3 tahun, jadi harga privat dan sosial hasil konversinya Rp 100.000./3 tahun = Rp 33.333,3/unit/tahun
- Harga hand sprayer di tempat penelitian yang di beli petani Rp 300.000,/unit. Masa pakai hand sprayer untuk luas 1 Ha 4 tahun, jadi harga privat dan sosial hasil konversi adalah; Rp 300.000/ 4 tahun = Rp 75.000,/tahun
- Harga gerobak sorong di tempat penelitian petani beli Rp 400.000,/unit dan masa pakai untuk 1Ha kebun sawit selama 3 tahun, jadi harga privat dan sosial hasil konversi adalah; Rp 400.000, / 3 tahun = Rp 133.333,3. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.

Tabel 3. Harga privat dan sosial pada *input non tradable* Hasil konversi usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah/tahun.

<i>I n p u t</i>	Satuan	Jml Fisik (rata-rata)	Harga Privat (Rp)	Harga Sosial (Rp)
Lahan	Ha	1	200.000,00	200.000,00
Bibit dan tanam	Batang	140 btg/Ha	1.000,00	1.000,00
Dodos	Unit	1	33.333,30	33.333,30
Hand speyer	Unit	1	75.000,00	75.000,00
Gerobak	Unit	1	133.333,30	133.333,30

Sumber : Hasil analisis 2016

1.4. Harga Privat dan Sosial Output

Harga privat Kelapa Sawit ditentukan dari harga yang berlaku di lokasi penelitian pada bulan Januari 2016 yaitu Rp 1.198,06. Harga tersebut petani langsung menjualnya ke pabrik PT.Mitra Inti Sejati Plantation (PT.MISP) melalui koperasi. Sedangkan penentuan harga sosial *output* mengacu pada harga *Free on Board* (FOB) dalam bentuk CPO dan Kernal karena komoditas ini merupakan komoditas Ekspor. Informasi dari PT.MISP bahwa harga FOB CPO dan Kernel per Januari 2016 harga CPO Rp 5.888,11 dan harga Kernel Rp 3.709,28. Pearson, dkk(2005) mengatakan bahwa dalam menentukan harga sosial *output* digunakan dua pendekatan harga, yaitu harga *Free on Board* (FOB) yang dipakai bila *output* sedang diekspor atau barang ekspor potensial di masa datang dan harga *Cost Insurance Freight* (CIF) untuk barang atau komoditi yang sedang diimpor atau kemungkinandiimpor.

Menurut PT.Mitra Inti Sejati Plantation (PT.MISP) Hasil konversi dari Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO 22 % dan menjadi Kernel 6 % sedangkan harga FOB CPO pada bulan Januari 2016 Rp 5.888,11 dan harga FOB Kernal Rp 3.709,28. Sehingga harga sosial Kelapa Sawit yang digunakan dalam analisis PAM pada penelitian ini adalah dengan asumsi dari hasil konversi rendemen TBS yang di olah menjadi CPO 22 % x Rp 5.888,11 = Rp 1.295,38 dan Kernel 6% x Rp 3.709,28 = Rp 222,56 sehingga di dapat harga sosial output sebesar Rp 1.517,94. per kg.

Setelah menentukan harga privat dan sosial dari setiap variabel *input* dan *output*, kemudian dihitung menggunakan *policy analysis matrik*(PAM) agar dapat menentukan keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah beserta hambatan yang berlaku pada usahatani tersebut. Keuntungan privat dan sosial sudah bisa didapatkan dari hasil *input* nilai pada tabel PAM karena keuntungan privat dan sosial merupakan selisih antara penerimaan dan biaya total dengan dasar perhitungan harga *output privat* yang diterima yaitu 1.800 kg x 12 bln x Rp 1.198,06 =Rp 25.878.096,-/ tahun dan keuntungan output sosial yaitu 1.800 kg x 12 bln x Rp 1.517,94 = Rp 32.787.504/tahun. Untuk lebih jelas lihat *Input* yang dibayar petani / tahun (tabel 4).

Tabel 4. Input yang dibayar Petani / tahun

No	Input	Jumlah		Harga		Jumlah
		Fisik	Privat	Jumlah	Sosial	
1	NPK	280	2.900,00	812.000,00	2.755,00	771.400,00
2	Herbisida Sistemik	3,159	50.000,00	157.950,00	40.000,00	126.360,00
	Jumlah			969.950,00		897.760,00
3	Tenaga Kerja					
	- Panen	24	67.272,73	1.614.545,52	53.818,18	1.291.636,32
	- Penyemprotan	6	67.272,73	403.636,38	53.818,18	322.909,08
	- Proning	12	67.272,73	807.272,76	53.818,18	645.818,16
	- Pemupukan	3	67.272,73	201.816,81	53.818,18	161.454,54
	- Pengangkutan Buah	24	67.272,73	1.614.545,52	53.818,18	1.291.636,32
	- Pemungutan Brondolan	12	67.272,73	807.272,76	53.818,18	645.818,16
	Jumlah			5.449.089,75		4.359.272,58
4	Hasil konversi					
	Lahan	1		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Bibit/Tanam	140	200.000,00	140.000,00	1.000,00	140.000,00
	Alat-alat					
	- Dodos	1	1.000,00	33.333,30	33.333,30	33.333,30
	- Hand Sprayer	1		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	- Gerobak	1	33.333,30	133.333,30	133.333,30	133.333,30
			75.000,00			
			133.333,30			
	Jumlah			581.666,60		581.666,60
	Total			7.000.706,35		5.838.699,18

Sumber : Hasil analisis, 2016

Berdasarkan data *input* dan *output* dari tabel PAM menunjukkan bahwa Pada kondisi aplikasi teknologi aktual, kinerja usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah pada tingkat harga yang dibayar dan diterima petani serta subsidi yang sedang berjalan nampak bahwa usahatani Kelapa Sawit memberikan keuntungan pada petani produsen secara individual (privat) (Tabel 5).

Tabel 5. Matrik Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah

Uraian	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		<i>InputTradable</i>	Faktor Domestik	
Privat	25.878.096,00	969.950,00	6.030.756,35	18.877.389,65
Sosial	32.787.504,00	897.760,00	4.940.939,18	26.948.804,82
Evek Divergensi	-6.909.408,00	72.190,00	1.089.817,17	-8.071.415,17

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Perhitungan analisis PAM usahatani kelapa sawit rakyat di kecamatan Subah.

1. Pendapatan Privat = A = Hasil Produksi / Ha / tahun x Harga penjualan = 1.800 kg x 12 bulan x Rp. 1.198,06 = Rp. 25.878.096,00
2. Pendapatan Sosial = E = Hasil Produksi / Ha / tahun x Harga konversiTBS menjadi CPO (22%) + kernel (6%) = 1.800 kg x 12 bulan x (22% x Rp. 5.888,11) + (6% x Rp. 3.709,28) = Rp. 32.787.504,00
3. Pendapatan Evek Divergensi = I = A - E = Rp. 25.878.096,00 - Rp. 32.787.504,00 = Rp - 6.909.408,00
4. Biaya Input Tradable Privat = B = Biaya Pembelian NPK di lokasi penelitian / tahun + Biaya Herbisida di lokasi penelitian / tahun = 280 kg x Rp. 2.900,00 + 3,159 ltr x Rp. 50.000,00 = Rp. 969.950,00
5. Biaya Input Tradable Sosial = F = Jumlah Pembelian NPK / tahun x 95% Harga Privat + Pembelian Herbisida / tahun x Harga Privat dikonversi = 280 kg x Rp. 2.755,00 + 3,159 ltr x Rp. 40.000,00 = Rp 897.760,00
6. Biaya Input Tradable Evek Divergensi = J = B - F = Rp. 969.950,00 - Rp. 897.760,00 = Rp. 72.190,00
7. Biaya Input non Tradable Privat = C = Biaya tenaga kerja + konversi harga lahan, bibit dan alat-alat = Rp. 5.449.089,75 + Rp. 581.666,60 = Rp. 6.030.756,35
8. Biaya Input non Tradable Sosial = G = Biaya tenaga kerja sosial + konversi harga lahan, bibit dan alat-alat = Rp. 4.227.681,69 + Rp. 697.500,00 = Rp 4.925.181,69
9. Biaya Input non Tradable Evek Divergensi =K = C - G = Rp 6.030.756,35 - Rp 4.940.939,18 = Rp 1.089.817,17
10. Keuntungan Privat = D = A - B - C = Rp. 25.878.096,00 - Rp. 969.950,00 - Rp. 6.030.756,35 = Rp. 18.877.389,65
11. Keuntungan Sosial = H = E - F - G = Rp. 32.787.504,00 - Rp. 897.760,00 - Rp. 4.940.939,18 = Rp. 26.948.804,82
12. Keuntungan Evek Divergensi = L = I - J - K = Rp-6.909.408,00 - Rp. 72.190,00 - Rp. 1.089.817,17 = Rp -8.071.415,17

Keuntungan sosial mengindikasikan keunggulan komparatif suatu komoditas dalam pemanfaatan sumberdaya yang langka di dalam negeri. Pada kondisi ini harga *input* dan *output* diperhitungkan dalam kondisi persaingan sempurna, dimana segala bentuk subsidi dan proteksi yang bersifat mendistorsipasar telah dihilangkan. Sistem komoditas dengan tingkat profitabilitas sosial (ekonomi) yang makin tinggi menunjukkan tingkat keunggulan komparatif yang semakin besar. Tabel 5.16 memperlihatkan bahwa

usahatani Kelapa Sawit memiliki profitabilitas sosial yang tinggi. Hasil ini merupakan indikasi awal bahwa usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah memiliki keunggulan komparatif.

Keuntungan privat pada tabel 4.16 merupakan indikasi bahwa komoditas Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah memiliki keunggulan kompetitif. Namun keuntungan privat ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan keuntungan sosialnya, perbedaan ini terjadi diduga karena adanya praktek monopsoni di lokasi penelitian. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan para petani pada pihak pabrik kelapa sawit atau dengan kata lain pihak pabrik kelapa sawit di tempat penelitian menjadi satu-satunya pembeli hasil panen. Sehingga pihak pabrik kelapa sawit tersebut memiliki kekuatan dalam mengendalikan pasar *output tersebut*.

Pearson *et al.* (2005) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis kegagalan pasar yang menyebabkan divergensi, yaitu: (1) monopoli (penjual yang menguasai harga pasar) atau monopsoni (pembeli menguasai harga pasar), (2) eksternalitas negatif yaitu biaya, dimana pihak yang menimbulkan terjadinya biaya tersebut tidak bisa dibebani biaya yang ditimbulkannya atau eksternalitas positif yaitu manfaat, dimana pihak yang menimbulkan manfaat tersebut tidak bisa menerima kompensasi atau imbalan atas manfaat yang ditimbulkannya), dan (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna, dimana tidak adanya lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang kompetitif serta informasi yang lengkap.

Secara teori, terobosan yang paling efisien dapat dicapai jika petani mampu menciptakan terobosan yang dapat menghapuskan kegagalan pasar dengan cara menjalin mitra kerja atau adanya bapak angkat, maka divergensi dapat dihilangkan dan efek divergensi atau nilai divergensi pada kolom keuntungan (tabel 4.16) akan bernilai positif. Pada kondisi seperti itu, nilai-nilai pada bagian privat (baris pertama tabel PAM) akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada bagian sosial (baris kedua tabel PAM), atau dengan kata lain pendapatan privat dan sosialnya bernilai sama, namun biaya total pada harga privat lebih kecil dibandingkan biaya total pada harga sosial.

2. Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif

Nilai DRCR usahatani Kelapa Sawit rakyat dari hasil penelitian adalah $DRCR = G / (EF) = 4.940.939,18 / (32.787.504 - 897.760) = 4.940.939,18 / 31.889.744 = 0,15$. Dengan demikian nilai DRCR sebesar 0,15 atau $DRCR < 1$. Tabel 4.17 menunjukkan bahwa usahatani ini memiliki keunggulan komparatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa untuk memproduksi Kelapa Sawit di Kecamatan Subah hanya membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 15 persen terhadap biaya impor yang dibutuhkan. Dengan kata lain, setiap Rp 1; yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut, hanya membutuhkan biaya domestik sebesar Rp 0,15. Artinya untuk memenuhi kebutuhan domestik, maka komoditas Kelapa Sawit sebaiknya di produksi sendiri di Kecamatan Subah dan tidak perlu di datangkan atau diimpor dari daerah atau negara lain.

Nilai PCR usaha kelapa sawit rakyat di tempat penelitian adalah $PCR = C / (A - B) = 6.030.756,35 / (25.878.096 - 969.950) = 6.030.756,35 / 24.908.146 = 0,24$. Lihat tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Domestic Resource Cost Ratio dan Private Cost Ratio Usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah

No	Keunggulan Kopratif dan Kompetitif	Nilai
A	Keunggulan Komparatif (DRCR)	0.15
B	Keunggulan Kompetitif (PCR)	0.24

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Nilai PCR usahatani Kelapa Sawit seperti pada Tabel 6 tersebut, juga menunjukkan bahwa usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah memiliki keunggulan kompetitif karena nilai PCR yang didapat sebesar 0,24 atau $PCR < 1$. Dengan kata lain, untuk meningkatkan nilai tambah *output* sebesar Rp 1; pada harga privat maka usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah hanya memerlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar Rp 0,24 atau kurang dari satu satuan. Dengan nilai PCR sebesar 0,24 maka usahatani Kelapa Sawit memiliki kemampuan lebih dalam membiayai faktor domestiknya. Dengan kata lain bahwa pendapatan yang dihasilkan mampu menutupi biaya produksi.

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Adanya intervensi pemerintah menyebabkan harga *output* berbeda antara harga yang diterima petani dengan harga yang ada di pasar Internasional. Kebijakan pemerintah biasanya terdiri dari kebijakan subsidi dan pajak serta kebijakan perdagangan.

Tujuan pemerintah melakukan campur tangan dalam perdagangan tersebut biasanya untuk melindungi produk dalam negeri. Contoh jika harga produk impor lebih murah dari harga produk yang diproduksi di dalam negeri, maka akan mengakibatkan lemahnya daya saing produk dalam negeri. Hal ini mengakibatkan konsumen lebih memilih barang impor sehingga permintaan terhadap produk dalam negeri menurun. Akibat lebih jauh adalah turunnya produksi dan pendapatan usahatani. Di lain pihak meningkatnya impor komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri akan menyebabkan meningkatnya pembayaran luar negeri yang akan menurunkan devisa negara dan memperlemah nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain. Selain itu akan timbul ketergantungan yang besar terhadap produk impor. Dalam hal ini diperlukan intervensi pemerintah dalam memberikan proteksi bagi masuknya barang impor dan subsidi bagi produsen.

Menurunnya produk dalam negeri itu akibat turunnya produksi dan pendapatan usahatani. Di lain pihak meningkatnya impor komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri akan menyebabkan meningkatnya pembayaran luar negeri yang akan menurunkan devisa negara dan memperlemah nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain. Selain itu akan timbul ketergantungan yang besar terhadap produk impor. Dalam hal ini diperlukan subsidi harga input dalam memberikan proteksi bagi masuknya barang impor dan subsidi bagi produsen.

Adanya campur tangan pemerintah pada ketersediaan Kelapa Sawit di Kecamatan Subah dapat dilihat dari besarnya transfer *output* yang didapat dari hasil analisis PAM. Transfer *output* merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat dengan penerimaan yang menggunakan harga sosial (tanpa kebijakan atau pada perdagangan bebas). Dari hasil analisis PAM nilai $TO = I = A - E = 25.878.096 - 32.787.504 = - 6.909.408$ Nilai negatif dari transfer *output* ($TO < 0$) menunjukkan tidak ada transfer insentif dari masyarakat

(konsumen) terhadap produsen dan pedagang. Dengan kata lain masyarakat menerima dan produsen membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya di bayar. Sebaliknya jika transfer *output* bernilai positif ($TO > 0$).

Tabel 7. Kebijakan Transfer *Output* dan Proteksi Harga *Output* Pada Komoditas Kelapa Sawit

No	Kebijakan Transfer pada <i>Output</i>	Nilai
1	Kebijakan transfer <i>output</i> (TO)	(-6.909.408)
2	Kebijakan proteksi pada harga <i>output</i> (NPCO)	0.79

Sumber ; Hasil Analisis, 2016

Hasil Transfer *Output* (TO) usahatani Kelapa Sawit pada Tabel 7 menunjukkan nilai negatif yang sangat besar, artinya bahwa harga *output* di pasar domestik jauh lebih rendah dibandingkan harga internasionalnya. Hal ini mengindikasikan tidak adanya transfer terhadap *output* yang menguntungkan petani produsen secara langsung.

Hasil TO didukung pula oleh nilai *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) yang merupakan rasio untuk mengukur *output transfer*. Nilai NPCO yang didapat dari hasil analisis PAM usahatani Kelapa Sawit adalah $NPCO = A / E = 25.878.096 / 32.787.504 = 0,79$. Dengan nilai NPCO sebesar 0,79 atau kurang dari satu ($NPCO < 1$) keadaan ini menunjukkan bahwa subsidi input tidak signifikan terhadap usahatani Kelapa Sawit rakyat dan bersifat disinsentif terhadap *output*. Artinya tidak ada bantuan ataupun intervensi terhadap biaya input maupun melalui subsidi harga pembelian maupun proteksi atau pengendalian harga beli aktual, terhadap hasil Kelapa Sawit Rakyat tersebut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan para petani pada pihak pabrik kelapa sawit atau dengan kata lain pihak pabrik kelapa sawit di daerah penelitian menjadi satu-satunya pembeli hasil panen dan tempat bergantung petani untuk aspek pembelian *output*. Sehingga pihak pabrik kelapa sawit tersebut memiliki kekuatan dalam mengendalikan harga *output*.

Rata-rata harga Kelapa Sawit di tingkat petani sebesar Rp1.198,06 per kg sedangkan harga di tingkat konsumen akhir (harga FOB) sebesar Rp 1.517,94 per kg. Terdapat selisih harga yang besar yaitu Rp 319,88 per kg diantara kedua harga tersebut, hal ini disebabkan karena adanya margin tataniaga dari petani ke konsumen akhir. Margin tataniaga tersebut di jelaskan pada tabel 8.

Tabel 8. Alur Tataniaga Kelapa Sawit Kecamatan Subah Kab.Sambas 2015

Tataniaga		Harga (Rp)
Rata-rata di Tingkat Petani	A	1.198,06
Konsumen Akhir	B	1.517,94

Sumber : Hasil Analisa, 2016

Margin tataniaga = harga di konsumen akhir (B) – harga di tingkat petani (A) = $1.517,94 - 1.198,06 = 319,88$ Keadaan ini menyebabkan tingkat permainan harga relatif tinggi, karena pihak pabrik yang menentukan harga sementara petani tidak punya pilihan lain karena terdesak kebutuhan merumuskan kebijakan yang lebih operasional sehingga dapat mengangkat kembali tingkat daya saing Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah.

Ikin (1999) mengungkapkan bahwa perbaikan mekanisme pasar Kelapa Sawit harus lebih kondusif, termasuk didalamnya kelembagaan, sarana dan prasarana pasar *input/output*, sampai ke perbaikan sistem pasca panen. Sebab

tanpa ada upaya dan terobosan baru kearah itu, tidak mustahil ekspor kelapa sawit dan daya saing Kelapa Sawit dalam negeri dapat tercapai lebih baik.

Menurut Zulkifli (2009), Kebijakan-kebijakan yang perlu segera ditempuh oleh pemerintah antara lain: (a) Menghilangkan atau mengurangi distorsi pasar baik pada pasar *input* maupun pada pasar *output*, seperti pajak/ retribusi komoditi, mengontrol harga pembelian, dan lain-lain, (b) Mengefektifkan program-program penelitian yang bersifat terapan untuk inovasi teknologi usahatani sehingga langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani serta terjangkau dengan anggaran usahatani yang dimiliki petani, (c) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas sentra-sentra produksi terhadap pasar *input* maupun *output*, seperti pembentukan pasar lelang komoditi yang bersifat berkesinambungan.

4. Kebijakan Terhadap Input

Berdasarkan nilai transfer *input* (TI) = $J = B - F = \text{Rp } 969.950 - \text{Rp } 897.760 = \text{Rp } 72.190$. Dari hasil analisis PAM pada komoditas kelapa sawit rakyat di Kecamatan Subah menunjukkan hasil yang positif ($TI > 0$). Hal ini mengandung arti bahwa produsen (petani Kelapa Sawit) menikmati subsidi *input* yang diberikan sehingga biaya *input* yang dibayarkan produsen lebih rendah dari harga sesungguhnya pada pasar bebas. Begitu pula dengan $NPCI = B / F = 969.950 / 897.760 = 1,08$. Hasil NPCI menunjukkan nilai lebih besar dari satu ($NPCI > 1$). Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak ada proteksi harga *input tradable* terutama pada pupuk bersubsidi di pasar domestik di bawah harga efisiennya. Dapat dikatakan juga bahwa total biaya *input* yang bisa dihemat sebesar 108 persen dari biaya yang seharusnya dikeluarkan petani Kelapa Sawit untuk memproduksi usahatani Kelapa Sawitnya jika subsidi diberlakukan. Sedangkan untuk *Input Domestik* (TF) = $K = C - G = 6.030.756,35 - 4.940.939,18 = 1.089.817,17$ Nilai $TF > 0$ berarti ada transfer dari petani (produsen) ke konsumen.

Tabel 9. Kebijakan Harga *Input Tradable*, Proteksi Harga *Input Domestik* dan *Intervensi* subsidi Terhadap *Input Domestik* Pada Komoditas Kelapa Sawit

No	Kebijakan Pemerintah pada <i>Input</i>	Nilai
1	Kebijakan harga <i>input tradable</i> (IT) Kebijakan proteksi pada harga <i>input</i> domestik	72.190,00
2	(NPCI) Intervensi pemerintah terhadap <i>input</i>	1,08
3	domestik (TF)	1.089.817,17

Sumber; Hasil Analisis, 2016

Kebijakan subsidi dari pemerintah dapat memberikan manfaat besar bagi petani Kelapa Sawit apabila pendistribusiannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syafa'at dkk. (2007) dalam kajiannya mengemukakan bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan subsidi pupuk langsung ke produsen pupuk ataupun ke petani yaitu: Pengelolaan subsidi relatif mudah, Tidak diperlukan identifikasi petani penerima subsidi sehingga pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja baik petani yang berhak maupun bukan. Pupuk bersubsidi justru dijual ke kios-kios karena terdapat kebebasan distributor tingkat kecamatan untuk menjual pupuk bersubsidi kepada siapapun. Efektivitas dalam meningkatkan daya beli petani untuk membeli pupuk

relatif tinggi. Hal ini berlaku dengan syarat apabila efektivitas harga eceran tertinggi (HET) terjamin.

Kondisi di lapangan, menunjukkan bahwa rata-rata harga aktual pupuk bersubsidi yaitu phonska Rp 2.900.- Padahal pupuk ini memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122 / Permentan/ SR.130/11/2013 Rp 2.300; per kg untuk pupuk ponska bersubsidi. Fenomena tersebut jelas memperlihatkan belum maksimalnya operasional kebijakan pengawasan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah selama ini. Oleh karena itu perlu adanya alternatif kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.

Selain *input* yang diperdagangkan, produsen (petani Kelapa Sawit) juga menggunakan *input* domestik (lahan, tenaga kerja, bibit Kelapa Sawit dan alat-alat) yang tidak diperdagangkan di pasaran dunia. Besarannya menunjukkan perbedaan antara harga sosial dan harga sesungguhnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor produksi yang tidak diperdagangkan disebut transfer faktor (TF). Perbedaan harga sosial dan harga sesungguhnya diterima bukan karena adanya subsidi atau proteksi dari pemerintah, melainkan karena perbedaan penilaian upah tenaga kerja dan biaya modal pada harga sosial serta pajak yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan berdasarkan harga sosial.

Pada tabel 9 dapat dilihat nilai transfer faktor pada komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah bernilai positif (TF>1) yang artinya bahwa biaya usahatani untuk barang-barang domestik yang tidak diperdagangkan dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan harga sesungguhnya jika terjadi persaingan sempurna. Dengan kata lain terdapat kebijakan pemerintah yang melindungi produsen *input* domestik.

5. Kebijakan Simultan Terhadap *input* dan *output*

Analisis koefisien proteksi efektif (EPC) untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah bersifat melindungi atau menghambat produksi domestik secara efektif. Kebijakan pemerintah yang bersifat protektif terhadap komoditas impor adalah subsidi *input*, pajak impor, kuota impor, hambatan birokrasi impor dan monopoli impor oleh pemerintah. Instrumen kebijakan protektif untuk komoditas ekspor adalah penyederhanaan tataniaga ekspor, subsidi *input*, subsidi ekspor dan subsidi konsumsi domestik. Hasil analisis PAM diketahui $EPC < 0$ dimana $EPC = (A - B) / (E - F) = (25.878.096 - 969.950) / (32.787.505 - 897.760) = 24.908.146 / 31.889.745 = 0,78$. Lihat tabel 10.

Tabel 10. Kebijakan Proteksi Simultan Harga *Input* Dan *Output*, Transter Bersih, Koefisien Keuntungan Dan Rasio Subsidi Pada Produsen Pada Komoditas Kelapa Sawit

Kebijakan proteksi pemerintah secara simultan pada <i>input</i>&<i>output</i>	
Kebijakan proteksi simultan pada harga <i>input</i> dan <i>output</i> (EPC)	0.78
Transter Bersih (NT)	(-8.088.401)
Koefisien Keuntungan (PC)	(0.70)
Rasio subsidi pada produsen (SRP)	(0.25)

Sumber; Hasil Analisis 2016

Pada tabel 12 nilai koefisien proteksi efektif pada perusahaan *Kelapa Sawit* bernilai 0,78 atau lebih kecil dari satu ($EPC < 1$). Nilai EPC lebih kecil dari satu mengandung arti secara simultan tidak terdapat kebijakan pemerintah

terhadap harga *output* maupun subsidi terhadap *input* yang melindungi produsen Kelapa Sawit di Kecamatan Subah.

Seperti yang telah dijelaskan pada kebijakan transfer *input* (TI) diatas, pada dasarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap *input tradable* sudah sangat meringankan petani, Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh kios- kios saprodi lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013. Sebaliknya harga produksi Kelapa Sawit ditetapkan oleh pihak pabrik kelapa sawit rendah yaitu Rp 1.198,06 per kg sedangkan harga di tingkat konsumen akhir (harga FOB) sebesar Rp 1.517,94; per kg.

Terdapat selisih harga yang besar yaitu Rp 319,88 per kg diantara kedua harga tersebut, hal ini disebabkan karenamargin tataniaga dari petani ke konsumen akhir. Panjangnya rantai tataniaga input Kelapa Sawit yang menjadikan harga *output* ditingkat produsen (petani) menjadi sangat rendah dan tidak terkontrolnya harga pupuk bersubsidi ditingkat petani mengakibatkan seolah-olah kebijakan pemerintah secara simultan pada *input* dan *output* tidak berpihak kepada petani.

Transfer bersih (NT) adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosial (dengan asumsi pasar bersaing sempurna). Transfer bersih menyatakan bahwa adanya tambahan surplus produsen atau sebaliknya berkurangnya surplus produsen sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah. hasil analisis PAM Transfer Bersih (NT) = L = D - H = 18.877.389,65 - 26.948.804,82 = - 8.071.415,17. Pada tabel 4.21 menunjukkan bahwatransfer bersih pada komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah bernilai negatif (-8.088.401), artinya kebijakan pemerintah yang ada (baik terhadap *input* maupun *output*) pada produsen yang mengusahakan komoditas Kelapa Sawit akan menurunkan surplus produsen. Hal ini berarti komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah memerlukan proteksi dari pemerintah, sehingga produsen tetap mau berproduksi (*surplus* produsen meningkat), karena apabila tidak ada rangsangan yang diterima petani, tidak tertutup kemungkinan petani akan beralih menanam komoditas lainnya.

Koefisien Profitabilitas (PC) adalah perbandingan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Rasio ini menunjukkan pengaruh dari kebijakan yang menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial. Sedangkan Rasio Subsidi Produsen (SRP) menyatakan persentase subsidi atau insentif bersih atas penerimaan sosial. Nilai koefisien Profitabilitas (PC) = D / H = 18.877.389,65 / 26.948.804,82 = 0,70 dan Rasio Subsidi pada Produsen (SRP)= L / E = 8.088.400,70 / 32.787.504,00 = 0,25 dapat dilihat pada tabel 4.17.

Nilai koefisien profitabilitas pada komoditas tersebut lebih kecil dari satu (PC < 1). Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima produsen yang mengusahakan komoditas Kelapa Sawit lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan bersih sosialnya. Artinya produksi Kelapa Sawit di Kecamatan Subahakan cenderung menurun jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani terutama pada penetapan harga *output*.

Rasio Subsidi Produsen pada komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah mempunyai nilai negatif (SRP < 0). Artinya dengan adanya kebijakan pemerintah, pada produsen yang mengusahakan komoditas Kelapa Sawit,

membayar biaya produksi dengan nilai lebih tinggi dari biaya imbalan berproduksinya (opportunity cost). Artinya kebijakan pemerintah, seperti adanya subsidi pada harga *input*, tidak cukup menguntungkan bagi pengembangan dan peningkatan produksi pada perusahaan komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah jika tidak diikuti dengan kebijakan harga *output*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Subah memiliki keunggulan komparatif yang diindikasikan oleh hasil *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR) 0,15 atau $DRCR < 1$ dan mempunyai keunggulan kompetitif dari hasil *Private Cost Ratio* (PCR) 0,24 atau $PCR < 1$.

Pengaruh subsidi untuk *input* usahatani Kelapa Sawit sudah menunjukkan keberpihakan terhadap petani yang diindikasikan dengan nilai *Transfer Input* (TI) 175.897,50 atau $TI > 1$ namun subsidi pada harga *input* tersebut tidak cukup menguntungkan bagi pengembangan dan peningkatan produksi pada perusahaan komoditas Kelapa Sawit di Kecamatan Subah jika tidak diikuti dengan kebijakan harga *output*.

Tidak ada peningkatan harga terhadap *output* Kelapa Sawit di Kecamatan Subah, *Nett Transfer* (NT) = (-8.088.401). baik berupa subsidi harga pembelian maupun proteksi atau pengendalian harga beli aktual yang diindikasikan dengan oleh nilai *Transfer Output* (TO) yang negatif yaitu - 6.909.408, atau $TO < 0$

Saran

Kenyataan dilapangan harga *output* dalam rangka untuk meningkatkan daya saing usahatani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Subah sebenarnya standar tentang penentuan harga sudah ada tetapi petani kelapa sawit Rakyat tidak diikuti sertakan dalam menentukan harga TBS. Untuk itu disarankan perlu adanya kontrol dari pemerintah supaya harga ditingkat petani tidak dipermainkan oleh pihak pabrik.

Perlu adanya terobosan baru oleh petani kelapa sawit rakyat seperti mencari mitra kerja atau bapak angkat untuk memperbaiki mekanisme pasar baik *input/output*, sehingga mampu memecahkan dualisme struktur ekonomi yang lebih berpihak kepada petani. Dengan begitu, diharapkan petani Kelapa Sawit Rakyat akan lebih bergairah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatannya.

Perlu adanya penerapan sistem kontrol yang ketat dan evaluasi secara berkala dari pihak pemerintah terhadap kebijakan yang telah dibuat karena sangat berpengaruh pada peningkatan keunggulan kompetitif di tingkat masyarakat petani Kelapa Sawit yang akan berdampak pada pengembangan produktivitas Kelapa Sawit rakyat ke depan.

Disarankan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini terutama pada Kabupaten/Kota yang juga merupakan wilayah pengembangan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sanggau Kapuas, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Bengkayang. Sehingga dapat diperoleh suatu basis data mengenai posisi daya saing komoditas Kelapa Sawit di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2014. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas. 2014. *Laporan Produktifitas Kelapa Sawit Tahun 2013*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas. Sambas
- Monke, E. A. dan E. S. Pearson. 1989. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Cornell University Press, London.
- Novianti, T. 2003. *Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Unggulan Sayuran*. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Oemar, A dan Mulyana, A. 2006. *Daya Saing Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Selatan sebagai Subsektor yang Diintervensi Pemerintah*. Jurnal Sosio Ekonomika Vol. 12, No 1, Juni 2006: 21-32. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pahan, I. 2011. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar swadaya . Jakarta.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The McMillan Press Ltd. London.
- Simanjuntak, S.B. 1992. *Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Simatupang, P dan Sudaryanto T. 1990. *Pengembangan Agribisnis Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Proseding Perspektif Pengembangan Agribisnis Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Wigena, I.G. P. 2009. *Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan (Studi Kasus Di Perkebunan PIR-Trans PTPN V Sei-Pagar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)* Disertasi Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Zakaria, A.K, Sejati W.K, dan Kustiari R. 2010. *Analisis Daya Saing Komoditas Kedelai Menurut Agro Ekosistem : Kasus Di Tiga Provinsi Di Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi. 28: 21- 37.